



Konstruksi Realitas Seratus Hari Pertama Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla di Media Online: Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough

Alif Hasanah[✉] dan Hari Bakti Mardikantoro

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel

Diterima:

April 2017

Disetujui:

Mei 2017

Dipublikasikan:

Desember 2017

Keywords:

critical discourse analysis, construction of reality, online media, the first 100 days of Jokowi-JK

Abstrak

Tugas utama media massa adalah mengonstruksi realitas. Konstruksi realitas di media massa direpresentasikan melalui penggunaan kosakata dan gramatikal. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis wujud konstruksi realitas seratus hari pertama pemerintahan Jokowi-JK yang tercermin secara tekstual di media *online Detik.com, Kompas.com, dan Republika Online*. Metode pengumpulan data dalam penelitian yaitu metode simak dan metode pustaka. Adapun metode analisis data yang digunakan mengacu pada kerangka analisis wacana kritis Norman Fairclough yang mencakup deskriptif, interpretatif, dan eksplanatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teks-teks berita seratus hari pertama pemerintahan Jokowi-JK menampilkan Jokowi sebagai presiden yang ingkar janji, presiden yang dikendalikan oleh partai politik pendukung, dan presiden yang berani dan tegas. Secara tekstual ketiga media *online* tersebut merepresentasikan kepemimpinan Jokowi dengan menggunakan kosakata dan gramatikal yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan penggunaan kosakata dan gramatikal berimplikasi pada perbedaan orientasi penggunaan bahasa oleh media *online Detik.com, Kompas.com, dan Republika Online*. Wujud konstruksi realitas seratus hari pertama pemerintahan Jokowi-JK dapat diamati melalui teks-teks berita yang dimuat oleh media *online Detik.com, Kompas.com, dan Republika Online*. Melalui teks-teks berita tersebut, Jokowi ditampilkan sebagai presiden yang ingkar janji, presiden yang dikendalikan oleh partai politik, dan presiden yang berani dan tegas. Namun, Peran bahasa di media *online Detik.com* cenderung mengubur dan mengaburkan realitas. Berbeda dengan *Kompas.com* yang menggunakan bahasa untuk mengkritisi tetapi sekaligus juga membela Presiden Jokowi. Peran bahasa di *Republika Online* juga berbeda dengan kedua media *online* sebelumnya. *Republika Online* menggunakan bahasa untuk mengkritisi dan memperjelas realitas, sekaligus juga untuk menunjukkan sikap oposisionalnya terhadap pemerintahan Jokowi-JK.

Abstract

The main task of mass media is to construct reality. Reality construction in mass media is presented through the use of vocabularies and grammar. The aim of this study is to analyze the pattern of reality construction of the first 100 days of Jokowi-JK administration textually reported in some online media (Detik.com, Kompas.com, and Republika.com). The method of data collection is observation and literature review whereas the data method analysis used refers to Norman Fairclough critical discourse analysis covering description, interpretation, and explanation. The study found that textual news of the first 100 days of Jokowi-JK government shows that Jokowi is a liar president and is fully controlled by his supporting political party, but he is strict and a risk taker.

© 2017 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:

Kampus Unnes Kelud Utara III, Semarang, 50237

E-mail: alifah89.bsi@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam pandangan analisis wacana kritis (AWK), bahasa bukan merupakan sesuatu yang otonom, netral atau bebas nilai dalam merepresentasikan sebuah realitas. Bahasa adalah bagian dari peristiwa sosial. Fairclough (1989), mengatakan bahwa bahasa sebagai bentuk praktik sosial atau dalam pandangan Bourdieu (dalam Martono 2012), bahasa berhubungan dengan kekuasaan. Dengan demikian, dalam AWK bahasa tidak hanya dianalisis dari sisi tata bahasa, sintaksis, tetapi juga dihubungkan dengan konteks sosial yang merupakan tempat bahasa itu digunakan. Bahasa digunakan secara efektif oleh kelompok sosial untuk mengontrol kelompok sosial yang lain. Badara (2012), menambahkan bahwa bahasa menggambarkan bagaimana realitas dunia dilihat, memberikan kemungkinan seseorang untuk mengontrol dan mengatur pengalaman pada realitas sosial.

Sejalan dengan pendapat Eriyanto dan Badara, Mardikantoro (2014), mengemukakan bahwa bahasa yang dianalisis oleh wacana kritis tidak hanya menggambarkan aspek bahasa saja, tetapi juga menghubungkannya dengan konteks. Konteks dalam hal ini berarti bahasa dipakai untuk tujuan tertentu termasuk di dalamnya praktik kekuasaan.

Mengenai pengertian wacana, Kridalaksana (2011), yang menyatakan bahwa wacana ialah satuan bahasa terlengkap, dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel, buku, seri ensiklopedia, dsb), paragraf, kalimat atau kata yang membawa amanat lengkap.

Alwi, et.al. (1998), mendefinisikan wacana sebagai rentetan kalimat yang berkaitan yang menghubungkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lain itu membentuk kesatuan. Wacana dalam pengertian ini dipandang sebagai sederetan kalimat yang memiliki hubungan kohesi dan koherensi.

Beberapa definisi wacana di atas memaknai wacana hanya sebatas satuan lingual yang terbesar dalam hirarki gramatikal. Wacana

dalam beberapa pengertian tersebut, menurut Eriyanto (2012), dimaksudkan untuk menggambarkan tata aturan kalimat, bahasa, dan pengertian bersama. Kebenaran/ketidakbenaran sebuah wacana diukur berdasarkan kaidah sintaksis dan semantik.

Berbeda halnya dengan Jorgensen dan Phillips (2010), yang memandang wacana sebagai gagasan umum bahwa bahasa ditata menurut pola-pola yang berbeda yang diikuti oleh ujaran para pengguna bahasa ketika mereka ambil bagian dalam domain-domain kehidupan sosial yang berbeda, misalnya domain 'wacana medis' dan 'wacana politik'. Dengan demikian 'analisis wacana' merupakan analisis atas pola-pola tersebut. Wacana dalam pengertian ini tidak hanya sekadar satuan lingual yang lebih besar dari kalimat, tetapi juga wacana memiliki peran dalam domain-domain kehidupan sosial. Wacana memiliki peran dalam merekonstruksi dan mereproduksi realitas yang ada di kehidupan sosial, sehingga realitas tersebut tidak bisa lagi ditafsirkan apa adanya melainkan telah terdistorsi oleh kepentingan tertentu.

Tugas utama media massa termasuk media *online* adalah mengonstruksi realitas menjadi teks berita. Dalam proses konstruksi realitas, bahasa menjadi instrumen utama. Media *online* memanfaatkan bahasa untuk menyebarkan informasi ke ruang publik. Tidak hanya itu, bahasa juga dimanfaatkan dalam hal transfer ideologi pemilik media. Oleh karena itu, berita-berita yang hadir di ruang publik tidak bisa lagi dimaknai apa adanya, tetapi harus dimaknai secara kritis. Hal ini disebabkan berita-berita tersebut telah dilumuri oleh berbagai kepentingan, di antaranya kepentingan institusi media, institusi politik, penguasa, dan pengiklan. Hal yang sama juga terjadi pada teks-teks berita seratus hari pertama pemerintahan Jokowi-JK di media *online Detik.com, Kompas.com, dan Republika Online.*

Fenomena tradisi evaluasi seratus hari pertama pemerintahan telah menjadi semacam budaya yang wajib diperingati setiap kali usia pemerintahan yang baru telah memasuki seratus hari pertama. Di sisi lain, tradisi evaluasi seratus hari pertama pemerintahan Jokowi-JK memiliki

keunikan tersendiri dibanding dengan seratus hari pertama pemerintahan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh sosok Presiden Jokowi yang kemunculannya di kancah perpolitikan nasional telah menarik perhatian publik baik ketika beliau menjabat sebagai Walikota, Gubernur, hingga menjadi Presiden Republik Indonesia. Presiden Jokowi yang dinilai sebagai antitesis dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya telah ramai menjadi perbincangan publik, bukan hanya di kalangan elit politik, melainkan juga di kalangan masyarakat secara umum.

Berdasarkan beberapa uraian tersebut, perlu dilakukan analisis wacana kritis untuk mengungkap maksud tersembunyi di balik teks berita seratus hari pertama pemerintahan Jokowi-JK. Secara teoretis, hasil peneliti ini dapat memberikan sumbangan teoretis bagi pengembangan analisis wacana kritis. Secara praktis penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi akademisi, politisi, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dalam membaca peta perpolitikan di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini bisa menjadi rujukan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian tentang AWK teks berita di media massa.

METODE

Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan yaitu pendekatan teoretis dan pendekatan metodologis. Pendekatan teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan wacana kritis, sedangkan pendekatan metodologis pendekatan kualitatif kritis.

Desain penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) yang didasarkan pada pemikiran Fairclough. Fairclough (dalam Eriyanto 2012), membagi analisis wacana dalam tiga dimensi, yaitu analisis tekstual, analisis *discourse practice* dan analisis *social practice*. Selanjutnya Fairclough (1989), mengemukakan tiga langkah analisis teks, yaitu deskripsi, interpretasi dan eksplanasi. Kerangka analisis teks inilah yang digunakan untuk menganalisis teks-teks berita seratus hari pertama pemerintahan Jokowi-JK di media *online* *Detik.com*, *Kompas.com*, dan *Republika Online*.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode simak. Teknik yang digunakan yaitu teknik simak bebas libat cakap dan teknik catat. Selain itu, dalam penelitian ini digunakan juga metode studi pustaka.

Teknik analisis data dilakukan dengan mengacu pada kerangka analisis wacana yang dikemukakan Fairclough yang mencakup tiga kerangka analisis yaitu deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi. Kerangka deskripsi digunakan untuk menganalisis fitur-fitur formal kebahasaan (kosakata dan gramatikal), kerangka interpretasi digunakan untuk menganalisis faktor situasional yang melatari lahirnya sebuah teks, kerangka eksplanasi digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara teks dengan konteks sosial-kultural.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada tiga media *online* yang memberitakan wacana seratus hari pertama pemerintahan Jokowi-JK, yakni *Detik.com*, *Kompas.com*, dan *Republika Online*. Ketiga media *online* tersebut mengategorikan wacana seratus hari pertama pemerintahan Jokowi-JK sebagai topik terpopuler, topik pilihan, dan topik terhangat. Hal ini disebabkan wacana seratus hari pertama pemerintahan Jokowi-JK dianggap menarik, unik, dan menjadi perbincangan hangat di ranah publik. Ada sekitar 230 teks berita yang berkaitan dengan wacana seratus hari pertama pemerintahan Jokowi-JK.

Secara deskriptif, wujud konstruksi realitas seratus hari pertama pemerintahan Jokowi-JK menampilkan Presiden Jokowi sebagai presiden yang ingkar janji, presiden yang dikendalikan partai politik pendukungnya, dan presiden yang berani serta tegas. Semua wujud konstruksi realitas tersebut tampak dari kosakata dan gramatikal yang digunakan oleh media *online* *Detik.com*, *Kompas.com*, dan *Republika Online*.

Wacana yang berkaitan dengan realisasi janji politik Jokowi yaitu wacana yang berjudul *Ternyata Jokowi Masih Bagi-bagi menteri untuk Parpol*. Wacana tersebut direpresentasikan wartawan dalam beberapa kosakata tertentu yang bermakna ideologis.

Teks berita yang berjudul *Ternyata Jokowi Masih Bagi-bagi Menteri untuk Parpol* merupakan teks yang secara keseluruhan kontennya berbicara tentang pembagian jabatan politik oleh Presiden Jokowi kepada partai pendukungnya (KIH). Dalam teks berita tersebut, terdapat beberapa kosakata yang secara ideologis menggambarkan pola klasifikasi tertentu. Hal ini seperti yang terdapat dalam kutipan berikut:

- (1) Saat masih berstatus capres, Joko Widodo pernah bicara **menolak bagi-bagi roti kekuasaan atau bagi-bagi kursi menteri**. Namun toh Jokowi tak bisa mengelak dari **kompensasi politik** untuk para parpol pendukungnya yang tergabung dalam KIH, Koalisi Indonesia Hebat.
- (2) Jokowi yang sejak awal **menolak istilah koalisi** dan menggantinya dengan **istilah kerja sama** memang pernah **bicara bagi-bagi menteri** bukanlah budaya politik yang baik. "**Bagi-bagi kursi dan menteri itu tidak baik**," tegas Jokowi dalam pertemuan dengan Forum Pemred, di rumah makan Horapa, Jakarta, Selasa (15/4/2014) lalu.
- (3) Namun kini Presiden Joko Widodo pun **memberi kompensasi secara adil** kepada parpol pendukungnya di KIH dalam bentuk **jatah kursi menteri**, pimpinan lembaga, wantimpres, duta besar, dan lainnya. Dari 34 menteri, Jokowi menempatkan 15 menteri dari parpol, 4 menteri dari tim transisi, dan sisanya dari kalangan profesional

Beberapa kutipan di atas terdapat beberapa kosakata yang bermakna ideologis, di antaranya *bagi-bagi roti kekuasaan, bagi-bagi kursi menteri, kompensasi politik, jatah kursi menteri, membagi posisi Wantimpres, mendapat jatah*. Sekumpulan kosakata tersebut sejatinya merujuk pada satu frasa yang telah lazim dipakai dalam jagad perpolitikan Indonesia, yaitu politik transaksional (politik balas budi atau politik balas jasa).

Beberapa kosakata tersebut memperjelas kedudukan Jokowi selama seratus hari menjadi Presiden Republik Indonesia. Meskipun secara personal beliau menolak istilah 'bagi-bagi kursi', tetap saja beliau tidak bisa menolak permintaan partai-partai pendukungnya. Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi tidak bisa lepas dari cengkraman pragmatisme politik.

Pada kalimat judul berita, terdapat kata *ternyata*. Kata ini bermakna sudah nyata, ada buktinya, terbukti. Jika dikaitkan dengan teks berita tersebut, kata *ternyata* secara tersirat menjelaskan bahwa sebelum menjadi presiden, muncul berbagai asumsi bahwa Jokowi tetap akan bagi-bagi jabatan menteri kepada parpol pendukungnya. Asumsi itu dibantah oleh orang-orang yang mendukung Jokowi. Mereka menganggap Jokowi tidak akan bagi-bagi jabatan kepada parpol pendukungnya. Namun setelah dilantik sebagai presiden, terbukti Jokowi tetap menjalankan tradisi bagi-bagi jabatan kepada parpol pendukungnya. Pada titik ini, Jokowi dianggap telah membohongi rakyat Indonesia.

Wacana tentang realisasi janji politik pemerintahan Jokowi-JK juga ditemukan di media *online Kompas.com*. Beberapa judul wacana yang merepresentasikan realisasi janji politik Jokowi, di antaranya *Hari Ke-4 Jokowi-JK: Kabinet "Ramping" Rupanya Tetap 34 Menteri, Hari Ke-14 Jokowi-JK: Massa Mulai Menuntut Realisasi Janji, dan Ditagih, Janji Jokowi Bagikan 9 Hektar Lahan*.

Wacana yang berjudul *Hari Ke-4 Jokowi-JK: Kabinet "Ramping" Rupanya Tetap 34 Menteri* merupakan wacana yang mengulas tentang penyusunan kabinet pemerintahan Jokowi-JK. Dalam wacana tersebut disebutkan bahwa komposisi kabinet Jokowi-JK sama dengan komposisi kabinet pemerintahan sebelumnya. Hal ini seperti yang terdapat dalam kutipan berikut:

- (4) Jumlah menteri di kabinet **ternyata** sama dengan menteri kabinet SBY.

Padahal, Jokowi sebelumnya menyatakan **akan** membuat kabinet yang *ramping*

Sama halnya dengan *Detik.com, Kompas.com* juga menggunakan kata *ternyata* ketika merepresentasikan realisasi janji politik Jokowi dalam seratus hari pertama pemerintahannya. Kata *ternyata* yang digunakan *Detik.com* dan *Kompas.com* menunjukkan pengingkaran Jokowi akan janji-janji politik yang pernah disampaikan pada kampanye politik menjelang pemilihan Presiden 2014. Perbedaannya adalah kata *ternyata* yang digunakan *Detik.com* untuk merepresentasikan bukti pengingkaran Jokowi akan janji politik

terkait pembagian beberapa jabatan politik oleh Presiden Jokowi kepada partai politik pendukungnya yang pada momen kampanye politik Jokowi menolak politik transaksional. Kata *ternyata* yang digunakan *Kompas.com* merepresentasikan bukti-bukti komposisi kabinet pemerintahan Jokowi-JK yang tidak berbeda dengan komposisi kabinet pemerintahan sebelumnya yang pada momen kampanye politik Jokowi berjanji akan membuat kabinet yang ramping. Meskipun berbeda, kata *ternyata* yang digunakan oleh kedua media ini merujuk pada satu klausa singkat, yaitu Jokowi ingkar janji.

Wacana yang berjudul *Hari Ke-14 Jokowi-JK: Massa Mulai Menuntut Realisasi Janji* merupakan wacana yang mengulas adanya gerakan organisasi buruh yang menuntut realisasi janji politik Jokowi. Hal ini seperti yang terdapat dalam kutipan berikut:

- (5) Suara-suara **menuntut** Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla merealisasikan janji kampanyenya mulai terdengar, **meski** masa pemerintahannya baru menginjak dua pekan. Salah satunya organisasi buruh yang **menuntut** peningkatan kesejahteraan sesuai janji Jokowi

Berbeda dengan media *online Detik.com*, *Kompas.com* menggunakan diksi *menuntut* daripada *menagih* dalam kaitannya dengan realisasi janji politik Jokowi. Secara leksikal, kata *menuntut* bermakna meminta dengan keras (setengah mengharuskan supaya dipenuhi); berusaha keras untuk mendapat (hak atas sesuatu). Kata *menuntut* memiliki persamaan makna dengan kata *menagih*, *meminta*, dan *menggugat*. Jika dicermati makna kata *menuntut* dengan *menagih* terdapat perbedaan nilai rasa. Kata *menuntut* memiliki nilai rasa yang keras, tajam, sedangkan kata *menagih* memiliki nilai rasa yang biasa-biasa saja. Ketika dua kata tersebut digunakan oleh media *online* yang berbeda, maka akan menunjukkan perbedaan ideologi di antara media tersebut. Perbedaan ideologi tersebut juga terjadi antara *Detik.com* dan *Kompas.com* dalam memandang realisasi janji politik pemerintahan Jokowi-JK. *Detik.com* cenderung biasa-biasa saja dalam mengkritisi realisasi janji politik Jokowi, sedangkan *Kompas.com* cenderung keras dan tajam dalam

mengkritisi upaya Jokowi dalam merealisasikan janji politiknya.

Selain aspek kosakata, wujud konstruksi realitas seratus hari pertama pemerintahan Jokowi-JK juga direpresentasikan melalui penggunaan gramatika, yang salah satu wujudnya adalah ketransitifan. Teori ketransitifan digunakan untuk menjawab tiga persoalan pokok yang dikemukakan Fairclough (1989:120), yakni (1) tipe-tipe proses dan partisipan yang dominan, (2) penampakan agen, dan (3) penampakan proses. Ada tiga tipe-tipe proses yang dikemukakan oleh Fairclough, yaitu tindakan, peristiwa, dan atribusi.

Dalam teks pemberitaan seratus hari pertama pemerintahan Jokowi-JK di *Detik.com*, tipe-tipe proses yang ditampilkan didominasi oleh tipe tindakan. Hal ini tampak pada kalimat-kalimat yang terdapat di setiap teks pemberitaan seratus hari pertama pemerintahan Jokowi-JK. Berikut ini beberapa kalimat yang menandakan tipe-tipe proses berupa tindakan.

- (6) Sang Presiden **kerap sowan dan menjalin** komunikasi dengan Teuku Umar setiap kali akan mengambil keputusan penting.
- (7) Menjelang keputusan final soal pelantikan Komjen Budi jadi Kapolri, Jokowi pun **mengundang** Surya Paloh beberapa kali ke Istana Negara

Penggalan teks (6) dan (7) merupakan salah satu kalimat yang terdapat pada teks berita yang berjudul *4 Orang Penting yang Mempengaruhi Keputusan Jokowi*. Teks tersebut mengulas sepaik terjang empat orang penting yang sangat mempengaruhi keputusan Jokowi selama seratus hari pertama pemerintahannya. Yang tercetak tebal pada penggalan teks (6) merupakan bentuk kalimat aktif transitif dengan tipe proses yang berupa tindakan atau perbuatan. Frasa verbal yang menunjukkan tipe proses yang berupa perbuatan pada penggalan teks (6) yaitu *kerap sowan dan menjalin komunikasi*. Frasa verbal tersebut sekaligus menunjukkan pandangan media *online Detik.com* dalam mengonstruksi hubungan antara Jokowi dengan Megawati.

Verba *sowan* merupakan kata serapan bahasa Jawa yang memiliki makna menghadap atau berkunjung kepada orang yang dianggap

harus dihormati seperti raja, guru, atasan, atau orang tua. Jika dikaitkan dengan penggalan teks (6), *Detik.com* melalui verba *sowan* ingin mengungkapkan beberapa hal. Pertama *Detik.com* memandang relasi antara Jokowi dengan Megawati seperti relasi antara bawahan dengan atasan. Jokowi diposisikan sebagai bawahan sedangkan Megawati sebagai atasan. Kedua, dengan relasi yang seperti itu Jokowi harus selalu patuh dan taat terhadap perintah Megawati. Padahal, dalam teks tersebut jelas dikatakan bahwa kunjungan Jokowi ke Teuku Umar bukan lagi sebagai kader partai melainkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Tentunya hal ini menjadi tidak berterima ketika Jokowi masih diposisikan sebagai bawahan, sebab tidak ada lagi jabatan yang lebih tinggi daripada jabatan Presiden. Hal itu sesuai dengan teori yang dikemukakan Supriyadi dan Zulaeha (2017:9-10) bahwa pemberitaan media massa dalam berbagai tingkatan akan membentuk opini publik. Adanya berita yang berimbang menunjukkan partisipasi aktif media massa dalam pembangunan yang diwujudkan melalui kontrol dan kritik membangun. Terbukanya akses informasi ke publik dan adanya media massa yang tidak tendensius dalam pemberitaan akan meminimalkan *trial by the press*. Otoritas, otonomi, dan imunitas media massa akan semakin mendapat tempat jika adanya unsur bias pemberitaan dapat dieliminasi.

Penggalan teks (7) juga merupakan salah satu bentuk kalimat aktif transitif yang bermakna proses perbuatan. Yang tercetak tebal pada penggalan teks (7) merupakan verba yang menunjukkan tipe proses yang berupa perbuatan. Verba *mengundang* pada penggalan teks (7) merepresentasikan pandangan media *online Detik.com* dalam konstruksi relasi antara Jokowi dengan Surya Paloh.

Verba *mengundang* secara leksikal bermakna memanggil supaya datang; mempersilakan hadir, misalnya dalam rapat, perjamuan, dan lain sebagainya. Secara semantis, penggunaan verba *mengundang* dalam konstruksi kalimat memiliki nilai rasa yang halus, santun, terhormat. Verba tersebut biasanya ditujukan kepada orang yang status sosialnya lebih tinggi

atau minimal setara dengan orang yang mengundang.

Ada beberapa hal yang dapat dikemukakan sehubungan dengan pandangan media *online Detik.com* dalam penggalan teks (7) tersebut. Pertama peniadaan kata *Presiden* pada nama Jokowi menyebabkan status Jokowi ketika mengundang Surya Paloh menjadi tidak jelas. Apakah status Jokowi sebagai kepala negara atau sebagai kader partai ketika mengundang Surya Paloh untuk datang ke istana negara? Berbeda ketika Jokowi berkunjung ke kediaman Megawati, status Jokowi saat itu sebagai kepala negara. Hal ini tampak pada beberapa kalimat dalam teks yang mencantumkan kata *presiden* sebelum nama Jokowi. Kedua, melalui verba *mengundang*, media *online Detik.com* memosisikan Surya Paloh sebagai orang yang sangat dihormati Jokowi. Hal ini dianggap wajar sebab Surya Paloh merupakan sosok yang berperan penting terhadap kemenangan Jokowi di Pilpres 2014. Ketiga, penempatan klausa subordinatif-*menjelang keputusan final soal Komjen Budi jadi Kapolri*- pada awal kalimat memberi makna bahwa *Detik.com* memandang begitu pentingnya penetapan Komjen Budi sebagai Kapolri bagi pemerintahan Jokowi. Hal ini sekaligus juga menegaskan undangan Jokowi kepada Surya Paloh sarat dengan kepentingan politik.

Pendayagunaan aspek ketransitifan juga ditemukan dalam teks-teks berita seratus hari pertama pemerintahan Jokowi-JK di media *online Kompas.com*. Hal ini seperti yang tampak pada penggalan teks berikut:

- (8) **Tamu-tamu penting kemudian silih berganti mendatangi Istana.** Tujuannya tentu terkait nama-nama menteri itu. Mereka yang terlihat menyambangi Istana kala itu, di antaranya, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar.
- (9) Peran Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh kembali terlihat. **Dia mendatangi Istana pada 19 November 2014.** Satu hari kemudian, **Jokowi memutuskan melantik Prasetyo yang empat jam sebelumnya baru menyatakan resmi keluar dari Partai Nasdem**

Dua penggalan teks di atas dikutip dari teks berita yang berjudul *100 Hari dan Orang-orang Kontroversi Pilihan Jokowi*. Teks berita tersebut mengulas beberapa keputusan Jokowi yang dianggap kontroversi dan sarat dengan kepentingan politik. Di antara keputusan Jokowi tersebut antara lain pilihan menteri di Kabinet Kerja, pilihan Jaksa Agung, Pilihan Kapolri, dan pembentukan Dewan Pertimbangan Presiden. Dengan mengacu pada beberapa penggalan teks di atas, dapat diketahui pandangan media *online Kompas.com* terhadap konstruksi relasi antara Jokowi dengan beberapa elit partai politik pendukungnya.

Penggalan teks (8) jika dianalisis dari sisi ketransitifan, tampak bahwa yang menempati posisi aktor atau pelaku adalah *tamu-tamu penting*, sedangkan sasarannya adalah istana. Penggunaan frasa adverbial *silih berganti mendatangi* menunjukkan bahwa penggalan teks (8) termasuk teks yang berupa tipe proses perbuatan.

Ada beberapa makna ideologis yang dapat diungkap berdasarkan penggalan teks (8). Pertama, frasa yang menduduki aktor atau pelaku menegaskan bahwa orang-orang yang mendatangi istana bukanlah orang biasa atau masyarakat biasa, melainkan orang-orang yang memiliki pengaruh kuat di balik suksesnya Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia. Hal ini tampak pada penggunaan kata *penting* yang bermakna penegasan atau penguatan status atau kedudukan *tamu-tamu* tersebut. Kedua, frasa yang menduduki proses material atau perbuatan menunjukkan bahwa kedatangan tamu-tamu penting itu tidak secara bersamaan antara satu dengan yang lain, tetapi orang per orang. Selain itu, kedatangan mereka ke istana tidak hanya satu atau dua kali, tetapi juga berkali-kali. Hal ini menegaskan bahwa tamu-tamu yang disebut penting itu cukup intens membangun komunikasi politik dengan Presiden Jokowi selama seratus hari pertama pemerintahannya.

Ketiga, penggunaan kata *istana* sebagai *goal* atau sasaran dalam penggalan teks (8) juga memiliki makna ideologis. Kata *istana* yang dimaksud dalam teks ini adalah istana kepresidenan, yakni sebuah kediaman resmi

kepala negara atau presiden yang dalam hal ini di tempati oleh Presiden Jokowi beserta keluarganya. Oleh karena itu, kedatangan tamu-tamu penting tentu saja ingin bertemu Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia. Hal ini dapat dikatakan bahwa kedatangan tamu-tamu penting itu di istana negara bersifat politis, sebab kedatangan mereka mewakili institusi partai politik masing-masing.

Pada penggalan teks (9) juga ditemukan bentuk ketransitifan dengan tipe proses perbuatan. Berdasarkan penggalan teks (9), setidaknya ada dua bentuk ketransitifan dengan tipe proses perbuatan. Bentuk ketransitifan pertama yaitu klausa *Dia mendatangi istana pada 19 November 2014*. Bentuk ketransitifan kedua yaitu *Jokowi memutuskan melantik Prasetyo yang empat jam sebelumnya baru menyatakan resmi keluar dari Partai Nasdem*. Kedua bentuk ketransitifan tersebut merepresentasikan pandangan media *online Kompas.com* terhadap konstruksi relasi antara Jokowi dengan Surya Paloh.

Berdasarkan kedua bentuk ketransitifan tersebut, ada beberapa hal yang dapat dikemukakan sehubungan dengan pandangan *Kompas.com* terhadap konstruksi relasi Jokowi dengan Surya Paloh. Pertama, penggunaan persona ketiga tunggal 'dia' yang menempati posisi aktor dalam klausa. Persona ketiga tunggal dalam klausa tersebut mengacu pada Surya Paloh. Sebagai Ketua Umum Partai Politik, seharusnya persona ketiga tunggal yang tepat untuk mengacu ke Surya Paloh adalah *beliau* bukan *dia* sebab persona ketiga tunggal *beliau* menyatakan rasa hormat. Penggunaan persona ketiga tunggal *dia* bisa jadi menyesuaikan dengan kehadiran verba *mendatangi* yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh aktor.

Verba *mendatangi* secara leksikal memiliki makna 'datang di-, mengunjung, menghampiri, menyinggahi' atau 'datang untuk menyerang'. Verba *mendatangi* digunakan dalam konteks kalimat, seperti 'Sejumlah mahasiswa mendatangi gedung KPK' atau 'Banyak ormas mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan' dan sebagainya. Dengan demikian, verba *mendatangi* dalam penggalan teks (9) menegaskan bahwa kedatangan aktor bukan sekadar

kunjungan biasa melainkan kedatangannya karena ada sesuatu yang mendesak untuk dibicarakan dengan sasaran. Kedua, penggalan teks (9) tidak disebutkan bahwa kedatangan Surya Paloh ke istana atas undangan Presiden Jokowi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kedatangan Surya Paloh tersebut bisa jadi atas inisiatif sendiri mengingat perebutan kekuasaan atau jabatan politik di antara lingkaran elit-elit partai koalisi sedang gencar-gencarnya. Ketiga, penggunaan persona ketiga tunggal *dia* bisa jadi merupakan ekspresi kekesalan wartawan *Kompas.com* terhadap tindakan atau perbuatan elit-elit partai politik-termasuk Surya Paloh- yang tak henti-hentinya menekan Presiden Jokowi selama seratus hari pertama pemerintahannya.

Bentuk ketransitifan *Jokowi memutuskan melantik Prasetyo yang empat jam sebelumnya baru menyatakan resmi keluar dari Partai Nasdem* pada penggalan teks (9) juga mengandung makna ideologis. Bentuk ketransitifan kedua berkorelasi dengan bentuk ketransitifan pertama. Bentuk ketransitifan kedua tersebut memperjelas kedatangan Surya Paloh di istana kepresidenan.

Berdasarkan bentuk ketransitifan kedua *Jokowi memutuskan melantik Prasetyo yang empat jam sebelumnya baru menyatakan resmi keluar dari Partai Nasdem* pada penggalan teks (9), ada beberapa hal yang dapat dikemukakan sehubungan dengan konstruksi relasi antara Surya Paloh dengan Jokowi. Pertama, bentuk ketransitifan kedua tersebut menegaskan bahwa telah terjadi 'sesuatu' antara Jokowi dengan Surya Paloh sehari sebelum Prasetyo dilantik menjadi Jaksa Agung. 'Sesuatu' itu secara ideologis bisa berupa pembicaraan-pembicaraan politik yang mengarah pada kesepakatan untuk menjadikan Prasetyo sebagai Jaksa Agung, atau bisa juga 'sesuatu' itu berupa tekanan yang diberikan oleh Surya Paloh kepada Presiden Jokowi agar segera melantik Prasetyo. Hal ini dipertegas dengan penempatan klausa subordinatif 'satu hari kemudian' di awal kalimat. Klausa subordinatif 'satu hari kemudian' memiliki korelasi waktu dengan 'satu hari sebelumnya', yang pada penggalan teks (9)

disebutkan satu hari sebelum pelantikan Prasetyo, Surya Paloh mendatangi istana.

Kedua, pelantikan Prasetyo sebagai Jaksa Agung sarat dengan nuansa politik, terkesan tergesa-gesa, dan ada sedikit paksaan dari orang yang mengusulkan Prasetyo sebagai Jaksa Agung. Nuansa politik tersebut tampak pada frasa verbal 'memutuskan melantik' yang menempati posisi proses perbuatan dalam konstruksi kalimat. Selain itu, nuansa politik juga tampak pada keterangan tambahan yang dilekatkan setelah nama Prasetyo, yaitu 'yang empat jam sebelumnya baru menyatakan keluar dari Partai Nasdem.' Pada titik ini, tampak bahwa Surya Paloh memiliki pengaruh besar di pemerintahan Jokowi-JK, entah itu pengaruh positif atau negatif. Di sisi lain, Presiden Jokowi seolah-olah tidak memiliki kuasa apa-apa dan hanya mengikuti apa yang ditahankan oleh elit-elit partai politik pendukungnya.

Penggunaan ketransitifan juga ditemukan dalam teks-teks berita seratus hari pertama pemerintahan Jokowi-JK yang dimuat di media *Republika Online*. Hal ini seperti yang tampak pada penggalan teks berikut:

- (10) Bambang menilai, **Presiden dipaksa untuk memenuhi keinginan dan kepentingan para kekuatan politik pendukungnya**. Persoalan pun semakin meruncing dan bertele-tele. Selain itu menurutnya, **diam-diam, partai politik yang berada dibelakang Jokowi malah menikam Jokowi dari belakang**
- (11) Heri melanjutkan, 100 hari pemerintahan Jokowi kian membuktikan bahwa **KIH seperti tidak siap melihat pergerakan politik pemerintahan yang dijalankan oleh Jokowi dalam memimpin pemerintahan.**
- (12) **"Apalagi sumbu kecemburuan politik PDIP terhadap NasDem yang lebih dominan sudah mengemuka ke publik.** Saya melihat Jokowi baru merasakan betapa sulitnya panggung politik nasional," jelasnya

Tiga penggalan teks di atas dikutip dari dua teks yang berbeda. Meskipun tiga penggalan teks di atas berasal dari sumber yang berbeda, tetapi mengandung makna yang sama yakni bahwa ada ketidakharmonisan antara Jokowi dengan partai politik pendukungnya.

Penggalan teks (10) dikutip dari teks berita yang berjudul *Politikus Golkar: Diam-Diam Jokowi Ditikam dari Belakang*. Teks berita tersebut mengulas pandangan seorang politikus Golkar, Bambang Soesatyo, tentang manuver politik yang dimainkan oleh partai politik yang mendukung Jokowi.

Penggalan teks (11) dan (12) dikutip dari teks berita yang berjudul *Pengamat: Jokowi Terindikasi Tak Sejalan dengan KIH*. Teks berita tersebut mengulas pandangan seorang pengamat politik, Heri Budiarto, tentang hubungan Jokowi dengan partai politik pendukungnya yang terindikasi kurang harmonis.

Yang tercetak tebal pada penggalan teks (10) merupakan bentuk ketransitifan dengan tipe proses perbuatan. Ada dua bentuk ketransitifan dengan tipe proses perbuatan pada penggalan teks (10). Bentuk ketransitifan pertama yaitu ‘...presiden dipaksa untuk memenuhi keinginan dan kepentingan para kekuatan politik pendukungnya.’ Bentuk ketransitifan kedua yaitu ‘...diam-diam, partai politik yang berada di belakang Jokowi malah menikam Jokowi dari belakang.’

Bentuk ketransitifan pertama, jika dianalisis aspek ketransitifannya (aktor/agen, proses perbuatan, pasien/sasaran), tampak bahwa pasien atau sasaran adalah *Presiden*, sedangkan aktornya adalah *para kekuatan politik pendukungnya*. Verba yang menunjukkan tipe proses perbuatan adalah *dipaksa*.

Ada beberapa hal yang dapat dikemukakan terkait dengan pandangan penghasil teks terhadap konstruksi relasi antara Jokowi dengan partai politik pendukungnya. Pertama, penyebutan identitas pasien atau sasaran dalam teks. *Republika Online* sebagai penghasil teks tidak menyebut nama Jokowi melainkan menyebut jabatannya sebagai kepala negara. Hal ini menunjukkan bahwa Jokowi masih dianggap lemah meskipun beliau sudah menjadi Presiden.

Kedua, verba yang menduduki proses perbuatan yakni *dipaksa* berasal dari kata dasar *paksa*. Kata *paksa* bermakna mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau, sedangkan kata *dipaksa/memaksa* bermakna

memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa bahkan disertai kekerasan baik verbal maupun nonverbal. Kata *dipaksa* memberi kesan bahwa elit-elit partai politik pendukung Jokowi tidak memperlakukan Jokowi sebagaimana layaknya seorang kepala negara diperlakukan. Tidak ada bedanya perlakuan yang diberikan oleh elit parpol tersebut baik ketika Jokowi masih berstatus kader partai maupun setelah menjadi presiden. Intinya Jokowi harus melakukan semua hal yang diinginkan oleh elit-elit partai politik tersebut.

Ketiga, penyebutan aktor dengan nomina tak bernyawa atau abstrak ‘para kekuatan politik pendukungnya’. Penggunaan nomina abstrak tersebut menyebabkan identitas aktor menjadi tidak jelas. Memang hampir semua teks yang mengulas seratus hari pertama pemerintahan Jokowi-JK terutama yang berkaitan dengan tekanan elit-elit partai politik terhadap Jokowi, *Republika Online* cenderung menggunakan nomina tak bernyawa atau nomina abstrak untuk menyebut aktor yang menekan Presiden Jokowi. *Republika Online* tidak langsung menyebut nama-nama elit parpol pendukung Jokowi. Hal ini menunjukkan adanya kehati-hatian *Republika Onlinet* terhadap elit-elit parpol pendukung Jokowi. Hal ini juga sekaligus membedakan *Republika Online* dengan *Detik.com* dan *Kompas.com* yang tampak vulgar dan tanpa ragu menyebut nama-nama elit politik yang menekan Presiden Jokowi.

Bentuk ketransitifan kedua pada penggalan teks (10) yaitu ‘...diam-diam, partai politik yang berada di belakang Jokowi malah menikam Jokowi dari belakang.’ Jika dianalisis aspek ketransitifannya (aktor/agen, proses perbuatan, pasien/sasaran), tampak bahwa yang menduduki posisi aktor adalah *partai politik yang berada di belakang Jokowi*, sedangkan pasien atau sasarannya adalah *Jokowi*, sedangkan aktornya adalah. Frasa verbal yang menunjukkan tipe proses perbuatan pada bentuk ketransitifan kedua adalah *malah menikam*.

Ada beberapa hal yang bisa dikemukakan sehubungan dengan pandangan *Republika Online* terhadap konstruksi relasi antara Jokowi dengan partai politik pendukungnya. Pertama,

pilihan aktor atau agen dengan nomina tak bernyawa 'partai politik yang berada di belakang Jokowi.' Dengan tidak mengkhususkan pada salah satu partai politik, pilihan aktor tersebut menegaskan bahwa semua partai politik-termasuk orang-orang yang ada di dalamnya-yang berada di belakang Jokowi ikut serta menikam Jokowi dari belakang. Kedua, penempatan adverbial *diam-diam* di awal klausa bersifat ideologis. Kata *diam-diam* menjelaskan tindakan aktor atau agen terhadap sasaran. Tindakan yang dimaksud seperti yang disebutkan dalam penggalan teks yaitu *malah menikam*. Kata *diam-diam* tersebut secara leksikal bermakna tanpa memberi tahu orang lain; secara rahasia. Dalam banyak hal, kata *diam-diam* sering berkonotasi negatif. Di sisi lain, frasa verbal yang menempati posisi proses perbuatan yaitu *malah menikam* juga bermakna ideologis.

Verba *menikam* secara leksikal bermakna menusuk dengan senjata tajam, seperti pisau, pedang, atau senjata tajam lainnya. Dalam penggalan teks (10), verba *menikam* bermakna metaforis yang digunakan oleh *Republika Online* untuk menggambarkan perbuatan elit-elit partai politik terhadap Presiden Jokowi. Verba *menikam* dalam penggalan teks tersebut tidak bermakna menusuk dengan senjata tajam, tetapi menusuk dengan aksi-aksi atau manuver politik yang bisa mengancam kedudukan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis aspek ketransitifan terhadap teks-teks berita seratus hari pertama pemerintahan Jokowi-JK, tampak bahwa tipe-tipe proses yang ditampilkan didominasi oleh tipe tindakan. Dominasi kalimat yang bertipe tindakan dalam wacana politik sejalan dengan penelitian Widyawari dan Zulaeha (2016) dan Santoso (2002). Widyawari dan Zulaeha (2016:6) menjelaskan bahwa dominasi kalimat tindakan menunjukkan tuturan ketiga pejabat (Ahok, Ganjar, dan Jokowi) mengandung maksud agar tindakan-tindakan yang dilakukan diketahui mitra tutur. Di sisi lain, Santoso menyebutkan bahwa kecenderungan adanya pengdayagunaan klausa proses material atau tindakan oleh para elite politik Indonesia memberikan jawaban awal tentang

kecenderungan-kecenderungan dalam budaya politik Indonesia yang lebih mengedepankan perilaku-perilaku yang mengandalkan kekuatan fisik daripada kekuatan otak atau nalar.

Teks-teks berita seratus hari pertama pemerintahan Jokowi-JK yang diproduksi oleh *Detik.com*, *Kompas.com*, dan *Republika Online* menunjukkan peran strategis bahasa dalam memengaruhi opini publik. Melalui pendayagunaan fitur-fitur formal kebahasaan, ketiga media *online* tersebut berupaya mengemas atau membingkai setiap topik pemberitaan agar menarik perhatian publik.

Bahasa berperan penting dalam proses produksi teks berita. Bahasa dalam pengertian ini tidak sekadar instrumen untuk menyampaikan pesan atau informasi tetapi juga transfer ideologi media kepada khalayak pembaca. Transfer ideologi tersebut diwujudkan dalam bentuk pilihan kosakata, gramatikal, maupun struktur teks. Hal ini sejalan dengan penelitian Yang (2013), yang menyebutkan bahwa wacana perdebatan *Economic Cooperation Framework Agreement* (ECFA) adalah bentuk konstruksi ideologi sosial-politik. Ideologi ditampilkan melalui bahasa ketika pembicara politik menggunakan berbagai strategi untuk mencapai tujuan mereka. Melalui pilihan bahasa, identitas atau status sosial diwujudkan, menampilkan seseorang yang memiliki kekuasaan lebih besar, mendominasi, dan mengontrol lawan bicara. Dengan kata lain, sumber kekuasaan, dominasi dan ketidaksetaraan dapat diungkap melalui wacana perdebatan ECFA.

Mengacu analisis tekstual pada pembahasan sebelumnya, tampak perbedaan pendayagunaan fitur-fitur formal kebahasaan (kosakata dan gramatikal) oleh ketiga media *online* tersebut. Perbedaan ini sekaligus juga menunjukkan perbedaan peran bahasa pada ketiga media *online* tersebut. Peran bahasa di media *online Detik.com* cenderung mengubur dan mengaburkan realitas. Hal ini tampak pada pendayagunaan kosakata eufemisme dan metaforis dalam teks-teks berita *Detik.com*. Berbeda dengan *Kompas.com* yang menggunakan bahasa untuk mengkritisi tetapi sekaligus juga membela Presiden Jokowi.

Peran bahasa di *Republika Online* juga berbeda dengan kedua media *online* sebelumnya. *Republika Online* menggunakan bahasa untuk mengkritisi dan memperjelas realitas, sekaligus juga untuk menunjukkan sikap oposisionalnya terhadap pemerintahan Jokowi-JK.

SIMPULAN

Wujud konstruksi realitas seratus hari pertama pemerintahan Jokowi-JK dapat diamati melalui teks-teks berita yang dimuat oleh media *online Detik.com, Kompas.com, dan Republika Online*. Melalui teks-teks berita tersebut, Jokowi ditampilkan sebagai presiden yang ingkar janji, presiden yang dikendalikan oleh partai politik, dan presiden yang berani dan tegas. Namun, secara tekstual ketiga media *online* tersebut merepresentasikan kepemimpinan Jokowi dengan menggunakan kosakata dan gramatikal yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan penggunaan kosakata dan gramatikal berimplikasi pada perbedaan orientasi penggunaan bahasa oleh media *online Detik.com, Kompas.com, dan Republika Online*. Peran bahasa di media *online Detik.com* cenderung mengubur dan mengaburkan realitas. Berbeda dengan *Kompas.com* yang menggunakan bahasa untuk mengkritisi tetapi sekaligus juga membela Presiden Jokowi. Peran bahasa di *Republika Online* juga berbeda dengan kedua media *online* sebelumnya. *Republika Online* menggunakan bahasa untuk mengkritisi dan memperjelas realitas, sekaligus juga untuk menunjukkan sikap oposisionalnya terhadap pemerintahan Jokowi-JK.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan, Soenjono Dardjowidjojo, Hasan Lapoliwa & Anton M. Moeliono. 1998. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Badara, Aris. 2013. *Analisis Wacana; Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*. Jakarta: Kencana.
- Eriyanto. 2012. *Analisis Wacana Kritis; Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta. LKIS Group.
- Fairclough, Norman. 1989. *Language and Power*. London and New York: Longman.
- Jorgensen, Marianne W. & Louise J. Phillips. 2010. *Analisis Wacana; Teori dan Metode*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kridalaksana, Harimurti. 2011. *Kamus Linguistik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardikantoro, Hari Bakti. 2014. Analisis Wacana Kritis pada Tajuk (Anti) Korupsi di Surat Kabar Berbahasa Indonesia. *Litera*. 13(2).
- Martono, Nanang. 2012. *Kekerasan Simbolik di Sekolah; Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Santoso, Anang. 2002. Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Wacana Politik. *Disertasi*. Malang: PPs Universitas Negeri Malang.
- Supriyadi & Ida Zulaeha. 2017. Dimensi Ekonomi, Politik, dan Ideologi pada Artikel-Artikel di Media Massa Cetak Jawa Pos dalam Perspektif Analisis Wacana Kritis dalam *Seloka, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*. 6(1): 1-14 .
<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/seloka>
- Widyawari, Caecilia Petra Gading May & Ida Zulaeha. 2016. Representasi Ideologi dalam Tuturan Pejabat Negara pada Talk Show Mata Najwa dalam *Seloka, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 5(1): 1-11.
<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/seloka>
- Yang, Pei-Ling. 2013. A Critical Discourse Analysis of Taiwan's National Debate on Economic Ties with China. *Taiwan Journal of Linguistics* 11(2): 83-104.
http://tjl.nccu.edu.tw/main/uploads/11.2_4_1.pdf